

EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA KANTOR BPKAD KOTA DUMAI

Adinda Asra Rahmawati¹, Mesi Yendara², Rahmihayati³, Rica Insira⁴, Lili Suryani⁵

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Dumai, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

rahmihayati679@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai. Efektivitas dianalisis menggunakan indikator menurut Sutrisno yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparatur BPKAD yang terlibat langsung dalam penerapan SIPD, serta didukung oleh data sekunder berupa dokumen dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Kota Dumai pada umumnya berjalan cukup efektif. Aparatur memiliki pemahaman dasar mengenai SIPD, penggunaan sistem telah sesuai dengan kebutuhan kerja, serta membantu meningkatkan keteraturan, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kendala masih ditemukan terutama terkait gangguan teknis sistem dan keterbatasan pemahaman sebagian aparatur, namun tidak sampai menghambat pelaksanaan kegiatan secara umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIPD memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola keuangan daerah, dengan catatan perlunya peningkatan pelatihan dan dukungan teknis secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, efektivitas, pengelolaan keuangan daerah, BPKAD.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Dumai City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). Effectiveness was analyzed using indicators according to Sutrisno, which include program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through interviews and observations of BPKAD officials directly involved in the implementation of SIPD, and supported by secondary data in the form of related documents and regulations. The results of the study indicate that the implementation of SIPD at BPKAD Dumai City is generally quite effective. Officials have a basic understanding of SIPD, the use of the system is in accordance with work requirements, and helps improve the order, efficiency, and transparency of regional financial management. Obstacles were still found, mainly related to technical system disruptions and limited understanding of some officials, but did not hamper the implementation of activities in general. This study concludes that SIPD makes a positive contribution to improving regional financial governance, with a note on the need for increased training and ongoing technical support.

Keywords: Regional Government Information System, effectiveness, regional financial management, BPKAD.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam pengolahan data dan penyediaan informasi yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi kinerja organisasi pemerintahan.

Sebagai upaya mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menggantikan regulasi sebelumnya. SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mencakup perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaporan dan pengawasan pemerintahan daerah (Adisi and Abdul Sadad, 2022). Penerapan SIPD juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mewajibkan pemerintah daerah mengimplementasikan sistem ini secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah (Ummah, 2019).

Meskipun SIPD bertujuan meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi kendala, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, adaptasi terhadap sistem baru, dan stabilitas teknis aplikasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SIPD bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi masing-masing daerah.

Di Kota Dumai, BPKAD sebelumnya menggunakan sistem SIMAKDA yang relatif stabil. Namun, sejak tahun 2021 pemerintah daerah diwajibkan beralih ke SIPD, dengan penerapan penuh baru dimulai pada tahun 2025. Sebagai pengguna baru, BPKAD Kota Dumai menghadapi tantangan dalam penyesuaian alur kerja, pemahaman fitur sistem, serta kendala teknis, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas penerapan SIPD dalam penelitian ini dianalisis menggunakan indikator efektivitas program menurut Sutrisno, yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai (Sutrisno, 2011)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai karena relevan dengan fokus penelitian dan merupakan instansi yang secara langsung mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparatur BPKAD yang terlibat dalam penerapan SIPD, yang dipilih secara purposive.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pendukung dan peraturan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai dianalisis menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno, yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Pembahasan ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara dengan aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengoperasian SIPD.

1. Pemahaman Program

Pemahaman pegawai terhadap program SIPD menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebelum SIPD diterapkan pegawai BPKAD Kota Dumai sudah menerima penjelasan mengenai program tersebut. Penjelasan diberikan melalui kegiatan sosialisasi dan dokumen resmi yang menjelaskan tujuan serta manfaat SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pelatihan yang diberikan dinilai cukup membantu pegawai dalam memahami cara kerja SIPD terutama pada tahap awal penggunaan. Materi pelatihan disampaikan secara langsung disertai contoh penggunaan aplikasi sehingga memudahkan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru. Namun karena SIPD memiliki banyak fitur dan sering mengalami pembaruan sebagian pegawai masih membutuhkan pendampingan lanjutan agar tidak mengalami kesulitan saat pengoperasian.

Pembagian tugas dalam pelaksanaan SIPD juga sudah dipahami oleh masing-masing pegawai. Setiap bidang memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih terarah. Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan SIPD.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa pemahaman pegawai BPKAD Kota Dumai terhadap program SIPD sudah cukup baik. Meskipun demikian masih diperlukan upaya peningkatan kemampuan melalui pelatihan lanjutan agar seluruh pegawai dapat mengikuti perkembangan sistem dan menggunakan SIPD secara optimal.

Implementasi SIPD di lingkungan BPKAD Kota Dumai dinilai telah tepat sasaran. Sistem ini digunakan oleh aparatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. SIPD dinilai sesuai dengan kebutuhan kerja karena mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan dalam satu sistem berbasis digital.

Manfaat SIPD juga telah dirasakan dalam bentuk kemudahan akses data, peningkatan akurasi informasi, serta efisiensi proses kerja. Dengan demikian, sasaran program dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan terintegrasi dapat tercapai.

2. Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran program SIPD di BPKAD Kota Dumai terlihat dari kesesuaian antara tujuan program dan kebutuhan kerja pegawai. SIPD digunakan untuk membantu proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah agar lebih rapi dan terintegrasi. Sistem ini memudahkan pegawai dalam mengelola data serta memantau alur pekerjaan tanpa harus mengulang proses secara manual.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SIPD memang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari. Pegawai merasa terbantu karena data dapat diakses lebih cepat dan proses kerja menjadi lebih tertib. Pekerjaan yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama kini bisa diselesaikan dengan lebih efisien selama jaringan berjalan dengan baik.

Penggunaan SIPD juga difokuskan pada pegawai yang berkaitan langsung dengan tugas teknis keuangan daerah. Akses diberikan sesuai bidang kerja sehingga sistem digunakan oleh pihak yang memang membutuhkan dan memahami fungsinya. Hal ini membuat penggunaan SIPD lebih terarah dan tidak disalahgunakan.

Program SIPD dapat dikatakan sudah berjalan tepat sasaran di lingkungan BPKAD Kota Dumai. Program ini sesuai dengan kebutuhan kerja pegawai dan manfaatnya sudah dirasakan dalam aktivitas harian. Penggunaannya yang terkontrol juga membantu mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.

3. Tepat Waktu

Pelaksanaan SIPD di BPKAD Kota Dumai dinilai cukup sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan. Pada tahap awal memang ada beberapa penyesuaian saat pegawai mulai menggunakan sistem baru, tetapi hal tersebut tidak terlalu mengganggu jalannya pekerjaan.

Kegiatan pengelolaan keuangan tetap berjalan dan SIPD bisa digunakan dalam proses kerja harian.

Penggunaan SIPD membantu pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat terutama pada proses input dan pelaporan data. Alur kerja yang terintegrasi membuat pekerjaan menjadi lebih ringkas dibandingkan cara manual. Hal ini membantu pegawai menghemat waktu dan mengurangi pekerjaan yang berulang.

Selama penggunaan SIPD masih terdapat gangguan teknis seperti sistem yang lambat atau sulit diakses pada waktu tertentu. Gangguan ini biasanya terjadi saat jam sibuk atau mendekati batas waktu pelaporan. Kendala tersebut bersifat sementara dan dapat ditangani oleh tim teknis.

Pelaksanaan SIPD dapat dikatakan sudah cukup tepat waktu. Sistem ini membantu mempercepat pekerjaan meskipun masih ada gangguan teknis dalam kondisi tertentu. Secara umum SIPD mendukung kelancaran pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ada.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan utama program SIPD di BPKAD Kota Dumai adalah menyatukan sistem perencanaan dan penganggaran agar pengelolaan data menjadi lebih rapi dan mudah dipantau. Sistem ini juga digunakan untuk membantu meningkatkan keteraturan kerja dan memudahkan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan tersebut sudah mulai tercapai. Data kini lebih terpusat dan lebih mudah diakses sehingga proses koordinasi menjadi lebih lancar. Pegawai merasa terbantu karena alur kerja menjadi lebih jelas dibandingkan sebelum menggunakan SIPD. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini. Sebagian pegawai masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem dan gangguan teknis masih terjadi pada waktu tertentu. Keterbatasan jaringan internet dan kondisi infrastruktur juga menjadi hambatan dalam penggunaan sistem secara optimal.

Pimpinan telah melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan pelaksanaan SIPD. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan terutama dalam hal pelatihan pegawai dan penguatan infrastruktur pendukung. Hal ini dilakukan agar tujuan program dapat tercapai dengan lebih baik ke depannya.

5. Perubahan Nyata

Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Dumai membawa perubahan dalam cara kerja pegawai. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini sudah dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi. Alur kerja menjadi lebih tertata dan data lebih mudah dikelola dalam satu tempat. Pegawai merasa pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan. Proses input data, pelaporan, dan koordinasi antarbagian dapat dilakukan dengan lebih rapi dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Hal ini membantu pegawai bekerja lebih efisien dalam kegiatan sehari-hari.

Perubahan juga dirasakan pada tingkat instansi. Proses penganggaran dan pelaporan menjadi lebih terbuka dan dapat dipantau secara langsung. Pimpinan lebih mudah memantau perkembangan data dan menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Penggunaan SIPD dapat dikatakan membawa perubahan nyata baik bagi individu maupun instansi. Sistem ini membantu memperbaiki cara kerja, meningkatkan keteraturan data, dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih rapi dan mudah dipantau.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai pada umumnya telah berjalan cukup efektif. Aparatur telah memiliki pemahaman dasar mengenai SIPD melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan, walaupun masih diperlukan pendampingan lanjutan karena sistem yang digunakan cukup kompleks dan terus mengalami pembaruan.

Pemanfaatan SIPD telah sesuai dengan kebutuhan kerja aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah akses dan pengolahan data keuangan. Pelaksanaan SIPD juga relatif sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, meskipun pada kondisi tertentu masih terjadi kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan akses sistem.

Penerapan SIPD menunjukkan capaian tujuan yang positif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Perubahan nyata dapat dirasakan baik secara individu maupun kelembagaan, dimana proses kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menjadi lebih tertata dan berbasis sistem digital. Dengan demikian, SIPD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan tata kelola keuangan daerah di BPKAD Kota Dumai, namun tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BPKAD Kota Dumai berjalan cukup baik dilihat dari pemahaman pegawai, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan adanya perubahan nyata dalam cara kerja. SIPD membantu merapikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah serta memudahkan akses dan pemantauan data. Meskipun masih terdapat kendala seperti gangguan teknis dan keterbatasan pemahaman sebagian pegawai, hal tersebut tidak menghambat jalannya kegiatan secara umum.

Pelatihan lanjutan perlu diberikan secara berkala agar seluruh pegawai semakin terbiasa dengan penggunaan SIPD. Dukungan teknis dan infrastruktur juga perlu diperkuat agar gangguan sistem dapat diminimalkan. Evaluasi rutin sebaiknya tetap dilakukan untuk memastikan sistem terus sesuai dengan kebutuhan kerja dan dapat digunakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA :

- Adisi, C.A. and Abdul Sadad (2022) 'Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), pp. 150-164. Available at: <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>.
- Sutrisno (2011) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Ummah, M.S. (2019) 'analisis efektivitas kontribusi komunikasi masyarakat tanpa riba kota medan', *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), pp. 1-14. Available at: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.